

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA

IMPLEMENTATION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUND PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL EDUCATION IN EDUCATION AND CULTURE OFFICE OF NORTH KONAWE DISTRICT

Israwan¹, Sundi Komba², Jopang³

- 1) Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik PPs UHO; e-mail: israwanmopute@gmail.com
- 2) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: sundikomba@gmail.com
- 3) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: jopangopang@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi program dana bantuan operasional sekolah jenjang pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif tipe analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang dipilih secara purposive. Data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dana bantuan operasional sekolah jenjang sekolah dasar belum efektif. Dari lima dimensi implementasi program baru tiga dimensi yang terimplementasi secara efektif yakni pendataan dan alokasi dana; penyaluran dana; dan pelaporan, sedangkan dua dimensi lainnya belum terimplementasi secara efektif yakni sosialisasi dan organisasi pelaksana; dan penggunaan dana.

Kata-kata kunci: Implementasi program, Dana bantuan operasional sekolah, Sosialisasi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the implementation of the school operational assistance fund program at the primary education level at the Konawe Utara District Education and Culture Office. The method used is descriptive qualitative research type analysis. The informants in this study were 9 people who were selected purposively. The data obtained comes from interviews, observation and document studies. Data analysis consists of three activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation and conclusion/verification. The results of the study indicate that the implementation of the school operational assistance fund program at the elementary school level has not been effective. Of the five dimensions of the implementation, three dimensions have effectively implemented, namely data collection and allocation of funds; channeling of funds; and reporting, while the other two dimensions have not been effectively implemented, namely socialization and implementing organizations; and use of funds.

Key words: Program implementation, School operational assistance fund, Socialization.

PENDAHULUAN

Terdapat dua fenomena pendidikan yang ditemukan di Kabupaten Konawe Utara. Pertama, data perkembangan pendidikan di Kabupaten Konawe Utara pada 3 tahun terakhir dimana Angka Melek Huruf (AMH) penduduk di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi walaupun pada tahun 2017 terjadi penurunan. Demikian pula pada jumlah sekolah dan siswa sekolah dasar cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebanyak 9.982 siswa menurun menjadi 9.451 siswa. Demikian pula jika ditinjau dari angka tuntas wajar APK SLTP 95-100% di tahun 2017. Dengan demikian masih diperlukan kerja keras untuk dapat menyelesaikan program Wajar Dikdas 9 tahun.

Kedua, dari kajian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara ditemukan data yang kontradiktif khususnya pada penjabaran kekuatan dan kelemahan organisasi, dimana uraian kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara diantaranya adalah pengalokasian dana pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif cukup memadai. Sedangkan penjabaran kelemahan meliputi: a) partisipasi masyarakat di bidang pemikiran, tenaga dan pendanaan terhadap pengelolaan sekolah belum optimal; b) Sarana belajar mengajar di sekolah belum optimal sesuai SPM Pendidikan; dan kurangnya dana Operasional Pendidikan.

Selanjutnya pada tahun 2017, alokasi dana BOS untuk jenjang sekolah dasar di Konawe Utara relatif menurun dibanding tahun 2016 yaitu dari Rp 1.996.400.000 (2016) menurun menjadi Rp 1.512.160.000 (2017). Berdasarkan hasil penelitian melalui kajian laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Manajemen Dana BOS menunjukkan bahwa penurunan anggaran dana BOS pada tahun 2017 disebabkan karena terjadinya perubahan jumlah sekolah dan jumlah siswa. Selain itu, terlihat bahwa umumnya sekolah dasar penerima dana BOS di Kabupaten Konawe Utara tidak mengalokasikan dana BOS tersebut sesuai dengan peruntukannya seperti yang tertera pada Juknis. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa untuk komponen sumberdaya anggaran program tidak terimplementasi dengan baik.

Belum diketahui bagaimana pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara mengimplementasikan program dana BOS. Meskipun telah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan, sampai saat ini kita masih melihat sejumlah fenomena empiris yang mengindikasikan tentang belum

tercapainya tujuan-tujuan pendidikan di Kabupaten Konawe Utara. Permasalahan yang masih selalu diajukan sampai saat ini adalah bagaimana implementasi program dana bantuan operasional sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini berusaha menjawab kesenjangan literatur tersebut di atas.

Program dana bantuan operasional sekolah (Dana BOS) adalah suatu kebijakan pemerintah. Definisi kebijakan menurut Geurts (2012) adalah mekanisme-mekanisme politik, manajemen, finansial, dan administratif yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan yang eksplisit. Demikian juga menurut Park (2008) memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan, atau suatu set keputusan yang saling berkaitan, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara (sarana-sarana) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Program Dana BOS adalah kebijakan karena mencakup keputusan, tujuan dan sarana keuangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan-tujuannya memerlukan implementasi. Teori-teori tipologi kebijakan Howlett and Ramesh (2003) menyebutkan tentang tahap implementasi sebagai tahap keempat. Tahap implementasi adalah tahap di mana parameter-parameter implementasi kebijakan dibuat, yang dapat secara langsung mempengaruhi outcome kebijakan publik. Tahap implementasi dianggap sangat krusial karena kebanyakan kebijakan bersifat tidak terwujud dengan sendirinya, harus diwujudkan oleh berbagai pihak agar supaya mempunyai dampak yang diharapkan (Winarno 2007). Bowman (2005) menegaskan bahwa implementasi penting karena ia membuat kebijakan menjadi nyata, ia menghidupkan kebijakan.

Brynard (2005) menyatakan bahwa makna paling umum dari implementasi adalah melaksanakan, mencapai, memenuhi, menghasilkan, atau menuntaskan. Makna secara sederhana dari implementasi adalah serangkaian keputusan dan tindakan untuk menjalankan kebijakan. Definisi implementasi dari perspektif proses antara lain menurut Meter and Horn (1975) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan dari individu-individu publik dan privat (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah dinyatakan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan. Aktifitas-aktifitas yang merupakan pilar dari proses implementasi kebijakan menurut Jones (1991) adalah: (1) Pengorganisasian; yaitu pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit yang terkait serta metode untuk menjalankan program, (2) Interpretasi; yaitu aktifitas menafsirkan suatu program agar menjadi rencana dan arahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) Aplikasi; yaitu penyediaan perangkat pelayanan, pembayaran atau rutinitas lainnya sesuai dengan tujuan program.

Program yang menjadi substansi topik penelitian ini adalah Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, yakni bantuan operasional sekolah yang diarahkan untuk biaya non-personal. Kebijakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

METODE

Penelitian ini berlokasi di pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara dengan lokasi studi kasus pada salah satu sekolah dasar penerima Dana BOS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang ditentukan dengan cara *purposive sampling* atau disengaja dengan tujuan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan informasi mengenai masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini guna menghimpun data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dari Miles dan Huberman(1992), dimana analisis kualitatif ini terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk model pilar implementasi dari Jones (1991), hasil penelitian ini diuraikan menjadi tiga sub topik, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Hasil penelitian ini, kebijakan program Dana BOS di SDN 2 Asera belum melibatkan komite sekolah maupun orang tua siswa dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dari setiap pengalokasian dana BOS dan perencanaan yang tidak transparan sehingga tidak seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang termasuk organisasi pelaksana program dana BOS disini adalah yang disebut tim manajemen BOS sekolah yang meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, sekretaris, dan perwakilan wali murid. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) kepala sekolah tentang tim manajemen BOS SD Negeri 2 Asera. SK ini berisi penetapan tim manajemen BOS sekolah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS yang diterima sekolah dan juga susunan tim manajemen BOS sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai ketua, ada sekretaris dan bendahara yang berasal dari unsur guru, dan anggota yang merupakan wali murid, ada juga unsur komite sekolah.

Walaupun sudah dibentuk tim manajemen BOS sekolah, tetapi guru-guru yang tidak termasuk dalam tim manajemen BOS sekolah tetap membantu dan berperan dalam pelaksanaan BOS di SD Negeri 2 Asera. Guru-guru dilibatkan dalam rapat-rapat penentuan bendahara BOS, penyusunan RKAS dan program-program sekolah, pengadaan barang, dan pelaporan seperti yang dikemukakan oleh kepala SD Negeri 2 Asera:

“...menyusun RKAS yang diawali dengan rapat guru-guru, terus mengakomodasi kebutuhan guru-guru, baik guru kelas, guru penjas, guru agama termasuk kebutuhan sekolah secara umum. Setelah itu, dimasukkan dalam RKA”.
(Wawancara Tanggal 12 Januari 2018)

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS sekolah yang tertulis dalam buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun 2017 yaitu mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan, sekolah perlu melakukan publikasi tentang pelaksanaan program BOS yang ada di SDN 2 Asera. Dengan mengumumkan besar dana yang diterima, penggunaan dana BOS dalam papan pengumuman, serta memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan. Selain itu, sekolah melakukan sosialisasi kepada orangtua siswa yang biasanya dilakukan ketika awal tahun ajaran baru atau ketika kenaikan kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa selaku Ketua Komite Sekolah SDN 2 Asera yaitu Bapak Muhammad Tidu melakukan sosialisasi tentang adanya program BOS.

“...ketika kami diundang rapat wali murid, terutama ketika akhir tahun atau diawal tahun pelajaran kami pernah diundang. Disitu dari pihak sekolah menyampaikan tentang adanya BOS dan penggunaan-penggunaannya dilaporkan secara umum...”(Wawancara Tanggl 12 Januari 2018).

Untuk program BOS sosialisasi menjadi langkah penting karena pada awal tahun tersebut pemerintah menggulirkan program sekolah gratis. Dalam melaksanakan kebijakan sekolah gratis, Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu daerah yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk menambah dana BOS sehingga dana BOS menjadi satu-satunya sumber pembiayaan di sekolah. Dalam keterangannya, seorang informan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara menuturkan bahwa:

“Karena keterbatasan dana, sosialisasi hanya dilakukan selama satu hari. Oleh karenanya materi sosialisasi meliputi hal-hal yang pokok saja, dalam hal ini masalah pembukuan dan keuangan, selebihnya dipelajari dari buku juklak. Jadi materi sosialisasi meliputi informasi penatakelolaan, pertanggungjawaban, dan beberapa hal baru terkait keuangan yang ada di panduan. Bahkan tertib administrasi seperti SK tidak disinggung dalam sosialisasi. Peserta diberi banyak bahan (handout) dalam CD untuk dipelajari lebih lanjut sendiri”. (Wawancara, Tanggal 12 Januari 2018)

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini tentang pendataan dan alokasi dana program dana BOS yang harus sesuai petunjuk teknis. Sebelum mendapatkan dana BOS dari pemerintah, sekolah perlu memiliki data seluruh warga sekolah (siswa, guru dan karyawan sekolah) secara lengkap. Caranya dengan mengisi formulir data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C). Kemudian mengirimkannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui server online yang dimiliki Kemendikbud. Besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah itu berbeda-beda, tergantung jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Untuk itu, sekolah membuat Instrumen Data Pokok (IDP) sekolah penerima BOS yang dikirim ke tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.

Biasanya sekolah membuat IDP pada awal tahun ajaran ataupun pada awal tahun anggaran. Tahun ajaran dan tahun anggaran ini berbeda. Dimana tahun ajaran dimulai pada bulan Juni, sedangkan tahun anggaran BOS dimulai pada bulan Januari. Seperti yang dikemukakan oleh kepala sekolah SDN 2 Asera yang mengatakan bahwa:

“Sekolah melaporkan kepada UPK berupa format IDP-01, instrumen data pokok, yang berisi profil sekolah dan jumlah murid pada saat pembuatan IDP itu. Kemudian dari situ ya, sekolah akan menerima dana dari pemerintah sesuai

dengan banyaknya siswa di SD ini. Hal ini biasanya dilakukan setiap awal tahun anggaran atau awal tahun ajaran baru.” (Wawancara Tanggal 16 Januari 2018)

Didukung dengan pernyataan dari bendahara BOS yang menyatakan bahwa:

“Itu kita harus melaporkan jumlah siswa kepada dinas terus dana baru akan turun dari pemerintah langsung ke rekening sekolah. Itu ke nada format IDP-01.” (Wawancara Tanggal 16 Januari 2018).

Instrumen Data Pokok (IDP) ini berisi tentang data sekolah baik dari alamat sekolah, nomor rekening sekolah, nama bank yang digunakan sekolah, jumlah siswa, jumlah siswa, rombongan belajar, jumlah guru, kurikulum yang digunakan dan persentase pemanfaatan dana BOS. Untuk tahun anggaran 2013, besar biaya satuan BOS yang diterima sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa ketentuan untuk siswa SD sebesar Rp 580.000,00/siswa/tahun. Tanggapan tersebut dibenarkan pula oleh guru-guru di sekolah tersebut, sebagaimana petikan wawancara dengan guru SD Negeri 2 Asera:

“Pendataan siswa dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama wali kelas masing-masing dan diverifikasi ulang oleh tim yang ditunjuk dari diknas berdasarkan daftar hadir setiap hari. Proses verifikasi data siswa dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama dengan dewan guru sehingga diperoleh data siswa yang akurat”. (wawancara, tanggal 16 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak sekolah selalu melibatkan guru-guru dan wali kelas dalam melakukan pendataan siswa. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa guru-guru telah melaksanakan fungsinya dengan benar. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa guru dan wali kelas mengetahui kondisi siswanya masing-masing. Dalam aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan program dana BOS di SDN 2 Asera perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal yang termasuk didalamnya yaitu bagaimana cara penyaluran dana BOS, penerimaan dana BOS, penggunaan dana BOS dan pembuatan laporan atas implementasi kebijakan program dana BOS tersebut. Penyaluran dan Penerimaan Dana BOS diturunkan setiap tiga bulan sekali. Seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SDN 2 Asera dalam hasil wawancara.

“Untuk penerimaan dana BOS, diterimakan per triwulan... Jadi setahun kita menerima empat kali.” (Wawancara, tanggal 19 Januari 2018).

Dalam satu tahun penyaluran dana BOS terbagi menjadi empat periode atau lebih disebut dengan triwulan, yaitu triwulan pertama (bulan Januari sampai dengan bulan

Maret), triwulan kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni), triwulan ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan Agustus), dan triwulan keempat (bulan September sampai bulan Desember). Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bendahara BOS SDN 2 Asera mengatakan bahwa penyaluran dana BOS itu dari pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah. Dimana Bendahara menyebutkan,

“...membuat laporan jumlah siswa. Nanti dilaporkan kepada setiap menjelang awal tahun itu jumlah siswa berapa. Sehingga nanti dari pemerintah menentukan berapa jumlah yang diberikan kepada sekolah. Dana yang diterima sekolah langsung dari pemerintah.” (Wawancara 19 Januari 2018).

Jadi, setelah sekolah menyerahkan laporan kepada dinas terkait, mereka menunggu pemberitahuan dari UPK kalau dana BOS sudah turun dari pusat ke rekening sekolah. Sekolah akan memastikan bahwa dana BOS memang sudah benar-benar turun atau belum. Ketika dana sudah turun, sekolah mengambil dana BOS sesuai dengan kebutuhan. Selama ini, penyaluran penerimaan dana hampir selalu tepat waktu. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, ada kalanya dimana penyaluran dana itu tidak tepat waktu. Kepala Sekolah SDN 2 Asera mengatakan bahwa:

“Penyalurannya untuk SDN 2 Asera Alhamdulillah tepat waktu, kecuali yang triwulan satu yaitu periode Januari sampai Maret... khusus yang triwulan satu yaitu Januari sampai Maret itu bisa mundur sampai februari pencairannya. Tapi yang lainnya sudah lancar.” (Wawancara, tanggal 19 Januari 2018)

Kepala Sekolah SDN 2 Asera juga memberikan kemungkinan alasan mengapa penyaluran dana itu tidak tepat waktu.

“Tahun anggaran itu kan dimulai dari bulan Januari, jadi ya terkait dengan anggaran PEMDA karena mungkin butuh proses dan sebagainya.” (Wawancara, tanggal 19 Januari 2018).

Dari hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan bahwa dana BOS digunakan untuk operasional non personil seperti Biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM, Biaya evaluasi/penilaian, Biaya daya dan jasa. Penggunaan Dana BOS tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dikatakan penggunaannya belum efektif. Dana BOS tidak digunakan sesuai peruntukan sehingga walau dengan dana BOS maka kegiatan operasional non personil belum berjalan dengan baik. Kondisi ini maka cenderung akan menurunkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Konawe Utara. Temuan penelitian ini bahwa implementasi belum sesuai dengan model pilar implementasi Jones (1991).

SIMPULAN

Implementasi program dana BOS pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Konawe Utara pada umumnya belum berjalan dengan baik karena jika dilihat dari tahap sosialisasi, pendataan dan alokasi, penyaluran dana, penggunaan dana dan pelaporannya umumnya belum berpedoman pada buku panduan sehingga penggunaan dana BOS belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Aparat implementer program ke depan perlu lebih sistematis dan transparan dalam melakukan tahapan implementasi mulai dari pengorganisasian sampai aplikasinya.

REFERENSI

- Bowman, C., 2005. *Tacit Knowledge Some Suggestion For Operationalization*. USA: Prentice Hall, Inc
- Brynard, Petrus A. 2005. *Policy Implementation: Lesson For Service Delivery*. USA: Prentice Hall, Inc.
- Geurts. 2012. *Public Policy making: The 21st Century Perspective*. Netherland: Be Informed.
- Howlet, M. and Ramesh, J., 2003. *Studying Public Policy*. Inggris: Oxford University Press.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Penerbit Gaya Media.
- Meter, Donald S. Van, & Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework*. London: Sage Publication.
- Miles, M.B., dan Huberman A. M., 1997. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Buku Kita.